



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG
JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN REGULER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penataan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat berjalan terpadu dan terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler;
- b. bahwa seiring perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Jaringan Trayek Perkotaan Reguler;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN REGULER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
2. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, dan jenis kendaran tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
6. Gubernur DIY adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler merupakan Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan trayek ulang alik antar wilayah administrasi pemerintahan.

- (3) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Trayek Perkotaan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk Badan Hukum Indonesia.

Pasal 4

- (1) Perizinan penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penumpang angkutan perkotaan reguler wajib membayar tarif pelayanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap jaringan trayek.

Pasal 7

Dengan berlakukannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Reguler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 76 TAHUN 2016
 TENTANG
 JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
 PERKOTAAN REGULER

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN REGULER

NO	TRAYEK	RUTE
1	Trayek 12	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Pandeyan – Jl. Glagah Sari – Jl. Kusumanegara – Jl. Sultan Agung – Simpang KM 0 – Jl. KH. A. Dahlan – Simpang Serangan – Simpang Wirobrajan – Jl. Cokroaminoto – Jl. Pembela Tanah Air – Jl. Letjen Suprpto – Jl. Tentara Pelajar – Simpang Pingit – Jl. Magelang – Jl. Wolter Monginsidi – Lingkar UGM – Jl. Wolter Monginsidi – Jl. Magelang – Simpang Pingit – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Letjen Suprpto – Jl. Pembela Tanah Air – Jl. Cokroaminoto – Simpang Wirobrajan – Jl. KH. A. Dahlan – Simpang KM 0 – Jl. Sultan Agung – Jl. Suryopranoto – Jl. Ki Mangunsarkoro – Jl. Kusumanegara – Jl. Glagah Sari – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Giwangan.
2	Trayek 13	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Kol. Sugiono – Jl. Sisingamangaraja – Jl. Imogiri Barat – Ring Road Selatan – Jl. Parangtritis – Simpang Pojok Beteng Wetan – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Suryotomo – Jl. Mataram – Jl. Abu Bakar Ali – Jl. Suroto – Simpang Gramedia – Jl. Cik Di Tiro – Lingkar UGM (PP).
3	Trayek 14	Terminal Giwangan – Ring Road Selatan – Simpang Karangturi – Simpang Ketandan – Simpang Rejowinangun – Simpang Gedong Kuning – Jl. Kusumanegara – Jl. Suryotomo – Jl. Suroto – Simpang Gramedia – Jl. Cik Di Tiro – Jl. Colombo – Lingkar UGM – Simpang Mirota Kampus – Jl. C. Simanjuntak – Simpang Terban – Jl. Jend. Sudirman – Simpang Tugu – Jl. P. Mangkubumi – Jl. Kleringan – Jl. Malioboro – Jl. P. Senopati – Jl. Sultan Agung – Jl. Kusumanegara – Simpang Gedong Kuning – Simpang Rejowinangun – Simpang Ketandan – Simpang Karangturi – Ring Road Selatan – Terminal Giwangan.
4	Trayek 15	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Menteri Supeno – Jl. Sisingamangaraja – Jl. Menukan – Jl. Mangkuyudan – Simpang Gading – Jl. Mayjen Sutoyo – Simpang Pojok Beteng Wetan – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Ibu Ruswo – Alun-Alun Utara – Jl. Pangurakan – Simpang KM 0 – Jl. KH. A.

NO	TRAYEK	RUTE
		Dahlan – Jl. Wates – Simpang Gamping – Pasar Gamping – Sidoarum – Jl. Godean – Simpang Demak Ijo – Jl. Kyai Mojo – Simpang Pingit – Jl. Magelang – Jl. Wolter Monginsidi – Simpang Jetis – Lingkar UGM (PP).
5	Trayek 16	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Gambiran – Jl. Veteran – Simpang SGM – Simpang Gedong Kuning – Jl. Janti – Simpang Blok O – Simpang Janti – Jl. Laksda Adisutjipto – Simpang Munggur – Jl. Gejayan/Affandi – Simpang Condong Catur – Terminal Condong Catur – Ring Road Utara – Simpang Kentungan – Jalan Kaliurang – Simpang MM UGM – Lingkar UGM (PP).
6	Trayek 17 (Perintis Ring Road)	<p><u>Trayek 17A :</u> Terminal Giwangan – Simpang Druwo – Simpang Dongkelan – Simpang Pelem Gurih – Simpang Demak Ijo – Terminal Jombor – Simpang Monjali – Simpang Kentungan – Simpang Condong Catur – Simpang UPN – Simpang Maguwo – Bandara Adisutjipto – Simpang Janti – Simpang Blok O – Simpang Ketandan – Terminal Giwangan (Lingkar Ring Road).</p> <p><u>Trayek 17B :</u> Terminal Giwangan (Lingkar Ring Road) – Simpang Ketandan – Simpang Blok O – Simpang Janti – Bandara Adisutjipto – Simpang Maguwo – Simpang UPN – Simpang Condong Catur – Simpang Kentungan – Simpang Monjali – Terminal Jombor – Simpang Demak Ijo – Simpang Pelem Gurih – Simpang Dongkelan – Simpang Druwo – Terminal Giwangan.</p>

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001